

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Latar Belakang

Arus globalisasi menuntut terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk melahirkan suatu pemerintahan yang baik dibutuhkan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi rakyat. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2007 tanggal 25 Maret 2007 yang memberikan tuntutan kepada instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja (LK) merupakan Dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolahan sumber daya dan kepercayaan yang diberikan melalui misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai, Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala Daerah Kota Binjai dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah Kota Binjai serta peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan Pemerinta Kota Binjai.

Berdasarkan latar belakang tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai membuat Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2016 mencakup hal-hal sebagai berikut :

2.1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2016 sebagai sarana pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2016. Esensi Capaian Kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2016.

2.2. Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

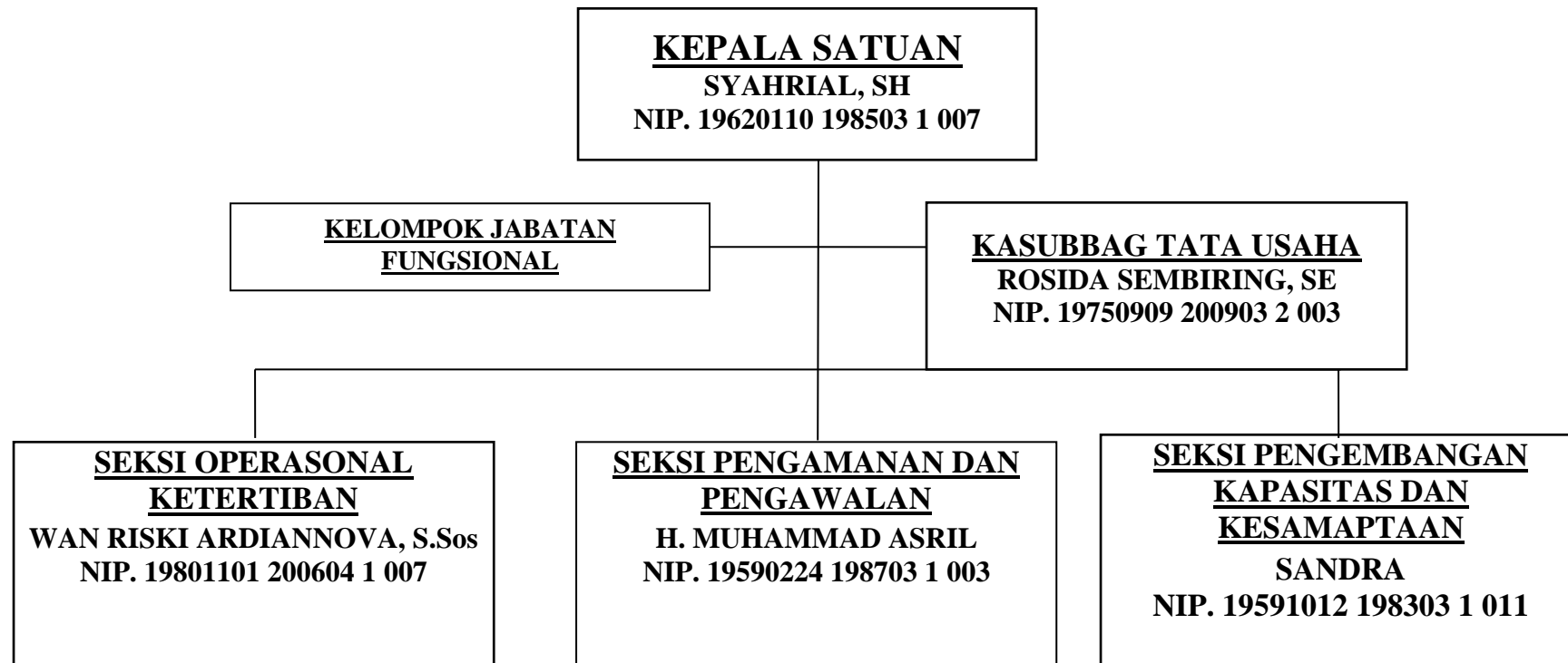
3. Kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai

3.1. Susunan Organisasi

Satpol PP Kota Binjai mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Kasubbag Tata Usaha;
- c. Seksi P.K Kesamaptaan;
- d. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
- e. Seksi Operasional Ketertiban;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI
(PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 19 TAHUN 2007)



3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Binjai) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan dan bertanggung jawab dibawah Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Satpol PP mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Satpol PP Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketenteraman, Ketertiban, serta Pengamanan Kebijaksanaan serta peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas di atas Satpol PP Kota Binjai mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Satpol PP;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Binjai;
- c. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Operasional Penertiban Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
- d. Penyusunan rencana / program kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- e. Pedoman tugas operasional sesuai pedoman dan petunjuk teknis/ operasional Penertiban Perda dan Keputusan Kepala Daerah;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- g. Pelaksanaan pembangunan kapasitas Satpol PP yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satpol PP;
- h. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan;
- i. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan unsur Pimpinan Pemerintah Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Setdakot) beserta lingkungan kerja;
- j. Pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

3.3. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan polisi Pamong Praja Kota Binjai pada tahun 2016 memiliki personil sebanyak 104 orang terdiri atas 69 PNS dan 35 Tenaga Satgas Lapangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN			
1	Pembina Utama	IV/e	-	Orang
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
3	Pembina Utama Muda	IV/c		Orang
4	Pembina Tk.I	IV/b	2	Orang
5	Pembina	IV/a	-	Orang
6	Penata Tk.I	III/d	2	Orang
7	Penata	III/c	2	Orang
8	Penata Muda Tk.I	III/b	5	Orang
9	Penata Muda	III/a	11	Orang
10	Pengatur Tk.I	II/d	3	Orang
11	Pengatur	II/c	12	Orang
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	15	Orang
13	Pengatur Muda	II/a	13	Orang
14	Juru Tk.I	I/d	4	Orang
15	Juru	I/c	3	Orang
16	Juru Muda Tk.I	I/b	3	Orang
17	Juru Muda	I/a	-	Orang
JUMLAH			75	Orang

No.	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
1	LAKI – LAKI	70	Orang
2	PEREMPUAN	5	Orang
JUMLAH		75	Orang

No.	BERDASARKAN PENDIDIKAN		
1	S-2	1	Orang
2	S-1	18	Orang
3	D-3	2	Orang
4	SLTA	31	Orang
5	SLTP	8	Orang
6	PAKET C	7	Orang
7	PAKET B	3	Orang
8	SD	5	Orang

4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2016

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
 - 3.1. Susunan Organisasi
 - 3.2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 3.3. Sumber Daya Aparatur
 - 4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2016

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

- A. Rencana Strategis
 - 1. Pernyataan Visi
 - 2. Pernyataan Misi
 - 3. Tujuan Strategis
 - 4. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Capaian Kinerja
 - 1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2016

B. Analisa Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016
2. Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2016
3. Target dan Realisasi Sasaran Strategis / Indikator Kinerja pada Renstra 2011 s/d 2016

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Keadaan Tahun 2016, Program, Anggaran, Realisasi dan Capaian

BAB IV PENUTUP**A. Kesimpulan****B. Saran – Saran****LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perencanaan kinerja Satpol PP Kota Binjai dalam penyelenggaraan pengelolaan berbagai sumber daya publik dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kota Binjai, maka disusunlah sebuah perencanaan strategis yang diharapkan nanti dapat mewujudkan sinergi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang mendukung Visi dan Misi Kota Binjai.

Sejalan dengan itu Satpol PP Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi

“Terwujudnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Binjai yang sadar dan patuh pada peraturan Daerah dan Perundang – undangan serta Keputusan Kepala Daerah”.

Visi tersebut mengandung arti dan makna yaitu :

- a. Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan–aturan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.

2. Pernyataan Misi

a. **Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang beriman dan bertaqwa**, Bahwa dengan memberdayakan dan meningkatkan sumber daya aparatur yang beriman dan bertaqwa, Handal, Profesional, Partisipatif dan Akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai akan terwujud aparatur yang berkualitas dan berkembang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

b. **Mewujudkan penegakan supremasi hukum.**

Bahwa Satpol PP Kota Binjai merupakan bentuk suatu organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

c. **Meningkatkan Kompleksitas Sarana dan Prasarana Pendukung dalam melaksanakan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum**

Bahwa efektivitas dan efisiensi melaksanakan pengawasan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang memadai.

3. Tujuan Strategis

Berdasarkan uraian di atas, maka Satpol PP Kota Binjai menetapkan Tujuan Strategis sebagai berikut :

3.1. Misi pertama : “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Handal, Profesional dan Akuntabel”, dengan **tujuan**, yaitu :

a. Terwujudnya Pemberdayaan Aparatur yang optimal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

b. Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

3.2. Misi kedua : “Mewujudkan penegakan supremasi hukum”, dengan **tujuan** : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di Kota Binjai.

3.3. Misi ketiga : “Meningkatkan Kompleksitas Sarana dan Prasarana Pendukung dalam melaksanakan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum”, dengan **tujuan** : Terwujudnya metode kerja aparatur yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pengawasan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang memadai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Adapun sasaran dari visi dan misi tersebut sebagai berikut :

1. Diberdayakan seluruh aparatur yang ada di Satpol PP Kota Binjai.
2. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
3. Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
4. Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan visi dan misi Satpol PP Kota Binjai tersebut maka Satpol PP Kota Binjai akan mewujudkan **target kinerja utama** pada tahun 2016 yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja :

1. Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan Indikator Kinerja :
 - a. Operasi razia penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) sebanyak 96 kasus.
 - b. Operasi razia penertiban Pekat (Penyakit Masyarakat) sebanyak 96 kasus.
 - c. Operasi razia penertiban IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebanyak 360 kasus.
 - d. Pengamanan/pengawalan pejabat daerah, hari besar sebanyak 96 kegiatan.
 - e. Pengendalian demonstrasi massa sebanyak 16 kegiatan.

- f. Bantuan tenaga pendamping TNI / Polri 4 personil.
 - g. Operasi penertiban papan reklame/baliho sebanyak 2 kegiatan.
2. Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dengan Indikator Kinerja :
- a. Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat) sebanyak 12 kegiatan.
 - b. Pelatihan pengendalian keamanan sebanyak 1 kegiatan.
 - c. Sosialisasi Trantibum sebanyak 3 kegiatan.
 - d. Penyusunan rencana strategis sebanyak 1 laporan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATPOL PP KOTA BINJAI			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya Operasi Razia Penertiban dan Penegakan Perda/Perwa :	
		1.Operasi penertiban PKL.	96 kasus
		2.Operasi penertiban Pekat.	96 kasus
		3.Operasi penertiban IMB.	360 kasus
		4.Pengamanan/ pengawalan pejabat daerah, & hari besar.	96 kegiatan
		5.Pengendalian demonstrasi massa.	16 kegiatan
		6.Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	4 orang
		7.Operasi penertiban papan reklame/baliho.	2 kegiatan
2.	Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai.	Pemahaman aparatur terhadap Tupoksi SKPD :	
		1.Kegiatan bimtek.	12 kegiatan
		2.Pelatihan pengendalian keamanan.	1 kegiatan
		3.Sosialisai Trantibum.	3 kegiatan
		4. Penyusunan Renstra.	1 laporan

No.	Program	Anggaran	Keterangan	
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 156.611.400	Program Sasaran Strategis Tidak Utama	
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rp. 4.468.000		
3.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 347.700.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.099.289.000
4.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 35.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 92.150.000
5.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah.	Rp. 25.500.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 98.995.000
	JUMLAH	Rp. 569.279.400	JUMLAH	Rp. 1.290.434.000

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PAPBD
SATPOL PP KOTA BINJAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya Operasi Razia Penertiban dan Penegakan Perda/Perwa :	
		1.Operasi penertiban PKL.	96 kasus
		2.Operasi penertiban Pekat.	96 kasus
		3.Operasi penertiban IMB.	360 kasus
		4.Pengamanan/ pengawalan pejabat daerah, & hari besar.	96 kegiatan
		5.Pengendalian demonstrasi massa.	16 kegiatan
		6.Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	4 orang
2.	Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai.	7.Penertiban papan reklame/baliho.	2 kegiatan
		Pemahaman aparatur terhadap Tupoksi SKPD :	
		1.Kegiatan Bimtek.	12 kegiatan

		2.Pelatihan pengendalian keamanan.	1 kegiatan
		3.Sosialisai Trantibum.	3 kegiatan
		4. Penyusunan Renstra.	1 laporan

No.	Program	Anggaran	Keterangan	
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 58.361.400	Program Sasaran Strategis Tidak Utama	
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rp. 4.468.000		
3.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp.1.063.801.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.099.289.000
4.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 290.890.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 92.150.000
5.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah.	Rp. 25.500.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 140.845.000
	JUMLAH	Rp.1.443.020.400	JUMLAH	Rp. 1.332.284.000

Jumlah Anggaran Tahun 2016 PAPBD Rp. 2.775.304.400

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Diberdayakannya seluruh aparatur yang ada di Satpol PP Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Bagian tata usaha : urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan keuangan dan perbendaharaan. 2. Bagian P.K kesamaptaaan : urusan pengaduan dan layanan masyarakat. 3. Bagian operasional dan ketertiban: urusan tugas operasional patroli penertiban rutin. 4. Bagian pengamanan dan pengawalan: urusan pengamanan dan penawalan.	750 surat laporan 30 surat pengaduan 36 SPT Operasional 360 SPT Pamwal	729 surat laporan 27 Surat pengaduan 36 SPT Operasional 360 SPT Pamwal	97 % 90 % 100 % 100 %
2.	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Sarana dan Prasarana bidang administrasi ketatausahaan 2. Sarana dan Prasarana bidang kesamaptaaan 3. Sarana dan Prasarana bidang operasional dan ketertiban 4. Sarana dan Prasarana bidang pengamanan dan pengawalan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 % 100 % 100 % 100 %
3.	Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. (Sasaran Strategis Utama)	1. Kegiatan Bimtek. 2. Pelatihan pengendalian keamanan. 3. Sosialisasi Trantibum. 4. Penyusunan Renstra.	12 kgtan 1 kgtan 3 kgtan 1 laporan	0 kgtan 1 kgtan 3 kgtan 1 laporan	0 % 100 % 100 % 100 %
4.	Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima). 2. Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat). 3. Operasi penertiban IMB (izin mendirikan bangunan). 4. Kegiatan pengamanan /	96 kasus 96 kasus 360 kasus 96 kgtan	77 kasus 79 kasus 309 kasus 95 kgtan	80 % 82 % 86 % 99 %

	undangan dan ketentuan yang berlaku. (Sasaran Strategis Utama)	pengawasan pejabat daerah, hari-hari besar dan acara-acara tertentu. 5. Pengendalian demonstrasi massa. 6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri. 7. Operasi penertiban papan reklame/baliho.	16 kgtan 4 orang 2 kgtan	16 kgtan 4 orang 2 kgtan	100 % 100 % 100 %
--	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan indicator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
1.	Diberdayakan seluruh aparatur yang ada di Satpol PP Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Bagian tata usaha : urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan keuangan dan perbendaharaan. 2. Bagian P.K kesamaptaa : urusan pengaduan dan layanan masyarakat. 3. Bagian operasional dan ketertiban: urusan tugas operasional patroli rutin. 4. Bagian pengamanan dan pengawasan: urusan pengamanan dan pengawasan.	750 srt/lap 30 srt/lap 36 SPT 360 SPT	712 srt/lap 24 srt/lap 36 SPT 360 SPT	94 % 80 % 100 % 100 %	750 srt/lap 30 srt/lap 36 SPT 360 SPT	729 srt/lap 27 srt/lap 36 SPT 360 SPT	97 % 90 % 100 % 100 %
2.	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota	1. Sarana dan prasarana bidang administrasi ketatausahaan 2. Sarana dan prasarana bidang kesamaptaa 3. Sarana dan prasarana bidang operasional dan ketertiban 4. Sarana dan prasarana bidang pengamanan dan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 % 100 % 100 % 100 %

	Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	pengawasan						
3	Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. (Sasaran Strategis Utama)	1. Kegiatan Bimtek. 2. Pelatihan pengendalian keamanan. 3. Sosialisasi Trantibum. 4. Penyusunan Renstra.	12 kgtan - - -	7 kgtan - - -	58 % 0 % 0 % 0 %	12 kgtan 1 kgtan 3 kgtan 1 lporan	0 kgtan 1 kgtan 3 kgtan 1 lporan	0 % 100 % 100 % 100 %
4	Penyelengga raan pelayanan (ketentraman , ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku. (Sasaran Strategis Utama)	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima). 2. Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat). 3. Operasi penertiban IMB (izin mendirikan bangunan). 4. Kegiatan pengamanan/pen gawalan hari-hari besar dan acara- acara tertentu. 5. Pengamanan demonstrasi massa. 6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri. 7. Operasi penertiban papan reklame/baliho.	96 kasus 96 kasus 360 kasus 96 kgtan 16 kgta 0 0	91 kasus 82 kasus 357 kasus 93 kgtan 16 kgtan 0 0	86 % 85 % 99 % 96 % 100 % 0 % 0 %	96 kasus 96 kasus 360 kasus 96 kgtan 16 kgtan 4 orang 2 kgtan	77 kasus 79 kasus 309 kasus 95 kgtan 16 kgtan 4 orang 2 orang	80 % 82 % 86 % 99 % 100 % 100 % 100 %

2. Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kendala/Hambatan
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima). 2. Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat). 3. Operasi penertiban IMB (izin mendirikan bangunan). 4. Kegiatan pengamanan/pengawasan hari-hari besar dan acara-acara tertentu. 5. Pengendalian demonstrasi massa. 6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri. 7. Operasi penertiban papan reklame/baliho.	96 kasus 96 kasus 360 kasus 96 kegiatan 16 kegiatan 4 orang 2 kegiatan	77 kasus 79 kasus 309 kasus 95 kegiatan 16 kegiatan 4 orang 1 kegiatan	- Masih kurangnya kesadaran pedagang walau sudah diberi surat peringatan. - Pedagang menggunakan beking aparatur. - Belum maksimalnya koordinasi antara SKPD terkait (Dispenda dan Ketertiban Pasar, Dinas Sosial dan Depnaker, Dinas Tarukim, dan Dispora dan Pariwisata.). - Masih kurangnya jumlah personil Satpol PP dalam melaksanakan operasi penertiban. - Masih minimnya jumlah personil Satpol PP yg berstatus PPNS

2.	Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai	1. Kegiatan Bimtek. 2. Pelatihan Pengendalian Keamanan. 3. Sosialisasi Trantibum. 4. Penyusunan Renstra.	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan	0 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan	- Kurangnya perencanaan yang matang sehingga anggaran kegiatan Bimtek diubah.

3. Target dan Realisasi Sasaran Strategis / Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2011 s/d Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016
1	Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima).	100 kasus	42 kasus	75 kasus	63 kasus	72 kasus	57 kasus	72 kasus	62 kasus	96 kasus	91 kasus	96 kasus	77 kasus
		2. Jumlah operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat).	120 kasus	62 kasus	85 kasus	67 kasus	72 kasus	67 kasus	72 kasus	67 kasus	96 kasus	82 kasus	96 kasus	79 kasus
		3. Operasi penertiban IMB (izin mendirikan bangunan).	240 kasus	234 kasus	596 kasus	556 kasus	576 kasus	497 kasus	576 kasus	530 kasus	360 kasus	357 kasus	360 kasus	309 kasus
		4. Kegiatan pengamanan / pengawalan hari-hari besar dan acara-acara tertentu.	36 kgtan	29 kgtan	36 kgtan	36 kgtan	96 kgtan	94 kgtan	96 kgtan	94 kgtan	96 kgtan	93 kgtan	96 kgtan	95 kgtan
		5. Pengendalian demonstrasi massa.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 kgtan	16 kgtan	16 kgtan	16 kgtan

		6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 orang	4 orang
		7. Operasi penertiban papan reklame/balihan o.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kgtan	2 kgtan
2	Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.	1. Kegiatan Bimtek.	12 kgtan	6 kgtan	10 kgtan	7 kgtan	12 kgtan	9 kgtan	12 kgtan	9 kgtan	12 kgtan	7 kgtan	12 kgtan	0 kgtan
		2. Pelatihan pengendalian keamanan.	-	-	-	-	2 kgtan	1 kgtan	-	-	-	-	1 kgtan	1 kgtan
		3. Sosialisasi Trantibum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kgtan	3 Kgtan
		4. Penyusunan Renstra.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	1 lporan

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Keadaan Tahun 2016, Program, Anggaran, Realisasi dan Capaian

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.099.289.000	948.724.100	90 %
1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.752.000	24.332.890	77 %
2. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	299.049.000	202.635.109	68 %
3. Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.800.000	82.800.000	100 %
4. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000	30.000.000	100 %
5. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	48.000.000	48.000.000	100 %
6. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	39.373.000	98 %
7. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000	30.000.000	100 %
8. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.800.000	15.545.000	93 %
9. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	420.888.000	399.566.000	95 %
10. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90.000.000	76.472.101	85 %
11. Kegiatan : Belanja sertifikasi/izin frekuensi, repiter dan HT	10.000.000	0	0 %
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92.150.000	17.345.000	19 %
1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	8.700.000	15 %
2. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.800.000	3.260.000	86 %
3. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.350.000	5.385.000	29 %
4. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komunikasi	10.000.000	0	0 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	140.845.000	135.610.000	96 %
1. Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	140.845.000	135.610.000	96 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.361.400	51.560.500	88 %
1. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0 %
2. Kegiatan : Sosialisasi peraturan peundang-undangan	58.361.400	51.560.500	88 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.468.000	4.374.100	98 %
1. Penyusunan Renstra	4.468.000	4.374.100	98 %
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.063.801.000	981.670.500	92 %
1. Kegiatan : Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	56.356.000	52.567.500	93 %
2. Kegiatan : Pelatihan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	26.880.000	0	0 %
3. Kegiatan : Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	213.300.000	202.650.000	95 %
4. Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan	48.000.000	48.000.000	100 %
5. Kegiatan : Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	659.745.000	618.933.000	94 %
6. Kegiatan : Pengendalian demonstrasi massa	59.520.000	59.520.000	100 %
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	290.890.000	30.000.000	10 %
1. Kegiatan : Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa	290.890.000	30.000.000	10 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	25.500.000	12.500.000	49 %
1. Kegiatan : Operasi penertiban pajak daerah	25.500.000	12.500.000	49 %
JUMLAH	2.775.304.400	2.181.784.200	79 %

Daftar di atas menunjukkan jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Binjai pada tahun 2016 adalah sebanyak 8 program dan 27 kegiatan dengan anggaran PAPBD sebesar **Rp. 2.775.304.400** dan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 2.181.784.200** mencapai **79 %**

BAB IV

PENUTUP

Melalui Laporan Kinerja (LK) Satpol PP Kota Binjai tahun 2016 sebagai perwujudan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Satpol PP Kota Binjai telah menerapkan Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah sebagai suatu media pertanggung jawaban kepada publik.

A. Kesimpulan

Pada tahun 2016 jumlah Personil Satpol PP Kota Binjai sebanyak 104 orang dengan perbandingan jumlah penduduk Kota Binjai sebanyak 283.788 jiwa.

Satpol PP Kota Binjai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menekankan kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi di Kota Binjai sebagai penegak Peraturan Daerah berupa :

1. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan penyelesaian 77 kasus;
2. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan penyelesaian 309 kasus ;
3. Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan penyelesaian 79 kasus;
4. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah dan Hari-Hari Besar dengan penyelesaian 95 kegiatan;
5. Pengamanan Demonstrasi Massa dengan penyelesaian 16 kegiatan;
6. Penertiban Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan dan Reklame dengan penyelesaian 2 kegiatan;

Untuk menunjang tupoksi Satpol PP Kota Binjai meningkatkan pemahaman aparatur dengan melaksanakan :

1. Pelatihan pengendalian keamanan sebanyak 1 kegiatan;
2. Sosialisasi Trantibum sebanyak 3 kegiatan;
3. Penyusunan rencana strategis 1 laporan;

Realisasi Capaian Sasaran dan indicator Kinerja Satpol PP Kota Binjai pada Tahun 2016 pada Sasaran Strategis Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku mencapai rata-rata 80 %, dan pada Sasaran Strategis Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai mencapai rata-rata 100 %.

Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2016 pada Satpol PP Kota Binjai yakni :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pedagang kaki lima di Kota Binjai walau sudah diberi surat peringatan.

2. Pedagang kaki lima menggunakan dukungan aparaturnya bila dilakukan penindakan terhadap aksinya berjualan di tempat yang dilarang berjualan.
3. Masih belum maksimalnya koordinasi SKPD terkait dengan satpol PP Kota Binjai.
4. Masih kurangnya jumlah personil Satpol PP Kota Binjai dalam melakukan tindakan penertiban.
5. Masih sedikitnya jumlah aparaturnya Satpol PP Kota Binjai yang berstatus PPNS.

Dari akuntabilitas keuangan Satpol PP Kota Binjai jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Binjai pada tahun 2016 adalah sebanyak 8 program dan 27 kegiatan dengan anggaran APBD sebesar **Rp. 2.775.304.400** dan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 2.181.784.200** mencapai **79**

B. Saran – Saran

Selain sebagai media pertanggung jawaban, melalui Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah diharapkan mampu menjadi bahan untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Satpol PP Kota Binjai.
2. Meningkatkan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi.
3. Sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
4. Mendorong instansi pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan, penataan, pemeliharaan, pelayanan perpustakaan dan arsip, pembinaan dan pengawasan termasuk penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pengaman kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Walikota;
 - d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian, PPNS dan atau aparat lainnya;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Perda dan Keputusan Walikota;
 - f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) & Laporan Kinerja;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima).	Laporan hasil Seksi Ops dan Penertiban Satpol PP
		Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat).	Laporan hasil Seksi Ops dan Penertiban Satpol pp, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata
		Operasi penertiban IMB (Izin Mendirikan Bangunan).	Laporan hasil Seksi Ops dan Penertiban Satpol PP dan Dinas Tarukim
		Kegiatan pengamanan / pengawalan hari - hari besar dan acara -acara tertentu.	Laporan hasil Seksi Pamwal Satpol PP
		Pengamanan demonstrasi massa.	Laporan hasil Seksi Ops dan Penertiban Satpol PP dan Polri
		Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	Laporan hasil Seksi Tata Usaha Satpol PP dan TNI
		Operasi penertiban papan reklame/baliho.	Laporan hasil Seksi Ops dan Penertiban dan Dispenda
2.	Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai.	1. Kegiatan Diklat.	Laporan hasil Seksi Tata Usaha dan Seksi PK Samapta
		2. Pelatihan pengendalian keamanan.	Laporan hasil Seksi Tata Usaha, Seksi PK Samapta, & Polri
		3. Sosialisasi Trantibum.	Laporan hasil Seksi Tata Usaha dan Seksi PK Samapta
		4. Penyusunan Renstra.	Laporan hasil Seksi Tata Usaha

Binjai, 2016
KEPALA SATPOL PP - PP
KOTA BINJAI

SYAHRIAL, SH
NIP. 19620110 198503 1 007

